

Implementasi Administrasi Kepegawaian sebagai Penunjang Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Tata Kelola Pemerintahan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Astri Setiawati^{* 1, a}, Linda Novianti^{2 b}

¹ STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

² STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

^a astrisetiawatiarifin@gmail.com^{*}; ^b lindanovianti979@gmail.com

^{*} Corresponding Author : astrisetiawatiarifin@gmail.com

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 083873260057

Abstrak : Administrasi kepegawaian merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana pelayanan publik. Pengelolaan kepegawaian yang tertib dan profesional menjadi prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi administrasi kepegawaian sebagai penunjang tata kelola pemerintahan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian di Kecamatan Maniis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meliputi pengelolaan data pegawai, administrasi kehadiran, dan pengarsipan dokumen. Implementasi tersebut berkontribusi positif dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur di bidang teknologi informasi serta belum optimalnya penerapan sistem administrasi kepegawaian berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi sistem administrasi guna memperkuat penerapan sistem merit serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kata kunci : Administrasi Kepegawaian; Tata Kelola Pemerintahan; Administrasi Publik.

Pendahuluan

Administrasi kepegawaian merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan kepegawaian yang tertib, sistematis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Administrasi kepegawaian tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang profesional dan akuntabel (Utaminingsy, 2021; Roza et al., 2024). *Good governance* menuntut adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian yang baik, karena manajemen ASN yang profesional akan mendorong birokrasi yang responsif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan publik (Hutauruk & Zulkifli, 2025).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya pengelolaan ASN secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Salah satu prinsip inti yang diatur dalam undang-undang ini adalah sistem merit, yaitu manajemen kepegawaian yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, objektif, dan terbuka tanpa dipengaruhi oleh intervensi politik dan nepotisme (Utaminingsy, 2021; Sunty et al., 2025). Sistem merit mencerminkan upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan ASN yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik yang dapat merusak kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, terutama pada tingkat kecamatan, implementasi administrasi kepegawaian memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Kecamatan sebagai perangkat daerah di garis terdepan pelayanan publik dituntut memiliki administrasi kepegawaian yang tertata, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi kepegawaian di tingkat kecamatan mencakup pengelolaan data ASN, administrasi kehadiran, pengarsipan dokumen, serta pelayanan administratif lainnya yang seluruhnya harus dilaksanakan secara profesional dan berbasis aturan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kepegawaian juga menjadi salah satu bentuk inovasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan (Arifin, Solihin & Murni, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan administrasi kepegawaian di tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam administrasi kepegawaian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi, serta hambatan terhadap penerapan sistem merit secara konsisten. Ketidaktertiban administrasi kepegawaian tersebut dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat (Hutauruk & Zulkifli, 2025). Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran penting dalam implementasi administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi kepegawaian di Kecamatan Maniis merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk mengetahui sejauh mana administrasi kepegawaian telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip sistem merit, serta bagaimana perannya dalam menunjang tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi administrasi kepegawaian sebagai penunjang tata kelola pemerintahan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kepegawaian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan ASN dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implementasi administrasi kepegawaian sebagai penunjang tata kelola pemerintahan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi nyata pelaksanaan administrasi kepegawaian, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Novianti, 2024). Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya melihat aspek empiris, tetapi juga menilai aspek normatif dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, serta dinamika yang terjadi dalam praktik administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan kecamatan. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti

sebagai instrumen kunci, serta menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2024). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk memahami bagaimana administrasi kepegawaian diimplementasikan dan bagaimana perannya dalam menunjang tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif, termasuk buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dan tata kelola pemerintahan (Novianti, 2023). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data lapangan sebagai data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparatur Kecamatan Maniis yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip kepegawaian, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks era digital, metode penelitian hukum dalam penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan penelitian kepustakaan yang memanfaatkan sumber literatur dan dokumen hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital. Analisis dilakukan dengan memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta aspek etika penelitian, di mana literasi digital menjadi kompetensi penting bagi peneliti dalam menyeleksi dan memverifikasi data yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi teknologi digital dengan analisis normatif dan konseptual secara ilmiah dan etis, sehingga hasil penelitian tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan perkembangan hukum dan administrasi pemerintahan kontemporer (Novianti, 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor Kecamatan Maniis. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi terkait mekanisme pelaksanaan administrasi kepegawaian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparatur kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berasal dari arsip, laporan, serta dokumen resmi lainnya guna memperkuat temuan dari hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antarfenomena. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk menghasilkan temuan yang mendalam, faktual, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020). Melalui tahapan analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi administrasi kepegawaian sebagai penunjang tata kelola pemerintahan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi administrasi kepegawaian di Kantor Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi pengelolaan data pegawai, administrasi kehadiran, pengarsipan dokumen kepegawaian, serta pelayanan administrasi kepegawaian lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin oleh aparatur kecamatan sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus dilakukan secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Pengelolaan data pegawai di Kecamatan Maniis dilakukan melalui pencatatan identitas pegawai, riwayat jabatan, kepangkatan, serta data administratif lainnya. Data kepegawaian sebagian besar masih disimpan dalam bentuk dokumen fisik, meskipun telah didukung oleh pencatatan secara digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian telah berjalan cukup baik dalam mendukung tertib administrasi, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung prinsip efisiensi dan modernisasi birokrasi. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses merupakan prasyarat penting bagi pengambilan keputusan yang akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan daerah.

Administrasi kehadiran pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi administrasi kepegawaian di Kantor Kecamatan Maniis. Pencatatan kehadiran dilakukan secara rutin dan digunakan sebagai dasar dalam penilaian kedisiplinan serta kinerja aparatur. Kedisiplinan kerja menjadi indikator penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam sistem merit ASN. Menurut (Siagian, 2012) kedisiplinan kerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan demikian, tertibnya administrasi kehadiran di Kecamatan Maniis berkontribusi dalam mendukung efektivitas kerja aparatur serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Pengarsipan dokumen kepegawaian di Kantor Kecamatan Maniis telah dilaksanakan secara sistematis, meskipun masih bersifat konvensional. Dokumen seperti surat keputusan, surat tugas, serta arsip administratif lainnya disimpan dengan rapi untuk memudahkan proses pencarian kembali apabila diperlukan. Sistem pengarsipan yang tertata berperan penting dalam menjaga keberlanjutan administrasi dan mendukung kepastian hukum dalam pelayanan kepegawaian. Menurut (Rohmah 2019), struktur dan sistem administrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam organisasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengarsipan yang baik juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena setiap keputusan dan tindakan administrasi dapat ditelusuri secara administratif. Meskipun secara umum implementasi administrasi kepegawaian telah berjalan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala yang masih dihadapi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi serta belum optimalnya penerapan sistem administrasi kepegawaian berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada efisiensi kerja serta kecepatan dalam penyediaan data dan pelayanan administrasi. Menurut Simpony et al. (2020), keterbatasan sistem informasi dan sumber daya pendukung dapat menghambat efektivitas pelayanan administrasi. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip sistem merit dan pengembangan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek penguasaan teknologi informasi sebagai bagian dari tuntutan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi kepegawaian di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta telah memberikan kontribusi positif dalam menunjang tata kelola pemerintahan. Administrasi kepegawaian yang tertib dan terstruktur mampu mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Namun demikian, untuk lebih mengoptimalkan peran administrasi kepegawaian sebagai penunjang tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip sistem merit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi sistem administrasi kepegawaian berbasis digital agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi administrasi kepegawaian di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berkontribusi positif dalam menunjang tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi kepegawaian yang tertib dalam pengelolaan data pegawai, kehadiran, dan pengarsipan dokumen telah mendukung kinerja aparatur kecamatan, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi teknologi informasi dan belum optimalnya sistem administrasi berbasis digital, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi sistem administrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta atas kesempatan, dukungan, dan fasilitasi yang diberikan dalam proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan serta seluruh aparatur Kecamatan Maniis atas kerja sama dan keterbukaan dalam memberikan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada STIE Gema Widya Bangsa Bandung, khususnya kepada dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel jurnal ini.

Referensi

- Arifin, A. L., Solihin, D., & Murni, S. (2024). Civil Service as Public Servant: Responsive, Reliable, and Adaptive to Digital Technology. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*.
- Hutauruk, R. P., & Zulkifli, Z. (2025). The Effectiveness of Good Governance in Improving Civil Servants Performance in the Era of Bureaucratic Reform. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 1–104.
- Rohmah, N. F. (2019). Struktur dan Desain Organisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–13.
- Roza, N., Sufyarma, M., & Syahril, S. (2024). Penerapan Sistem Merit ASN untuk Mewujudkan Good Governance pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Siagian, S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Simony, B. K., Anggara, A., Supriadi, D., & Gunawan, A. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Berbasis Web pada LPK Kurnia Dewi Kabupaten Tasikmalaya. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 5(1), 14–20. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v5i1.6537>
- Sugiyono. (2024). Metode Penelitian Kualitatif.
- Sunty, D. A., et al. (2025). Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Utaminingsyas, D. A., & Sumarmo, S. (2021). Reformasi Birokrasi Sumber Daya Manusia: Implementasi Sistem Merit. *Jurnal Media Administrasi*.